

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi sektor publik disertai tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia, tuntutan ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang pengelolaan keuangan Negara.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mendorong adanya desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, desentralisasi ini menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom.

Adanya desentralisasi pengelolaan pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, memaksa pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menciptakan system pengelelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, system ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, ekonomis, dan efisien serta bermanfaat untuk masyarakat.

Salah satu masalah penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah tersebut adalah anggaran, anggaran bias merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan anggaran.

Penyusunan anggaran adalah proses penentuan setiap manajer dalam melaksanakan program. Penyusunan anggaran banyak didominasi oleh tugas-tugas teknik, oleh karena itu seringkali para manajer menggunakan istilah keuangan yang dicantumkan dalam anggaran adalah orang. Orang menyusun anggaran dan harus hidup dengan anggaran tersebut.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan operating managers dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan di masa yang akan datang yang akan di tempuh oleh operating managers tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran. Tingkat partisipasi operating managers dalam penyusunan anggaran akan mendorong moral kerja yang tinggi dan inisiatif para manajer. Moral kerja yang tinggi merupakan kepuasan seseorang terhadap pekerjaan, atasan dan rekan sekerjanya.

Suatu anggaran agar berhasil harus melibatkan manajer dalam tanggung jawab pengendalian biaya untuk membuat membuat estimasi anggaran mereka sendiri. Dengan kata lain anggaran tidak di drop dari atas. Pendekatan dalam penyediaan data anggaran ini penting terutama anggaran tersebut akan digunakan untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja seorang manajer, hal tersebut mungkin akan menimbulkan kesebalan atau keengganan, dan bukan kerjasama atau kenaikan produktivitas.

Pendekatan penganggaran yang mengakibatkan manajer dalam penyusunan estimasi anggaran ini disebut dengan *self imposed budget* partisipasi anggaran (anggaran partisipasi). *Self imposed budget* atau partisipasi anggaran adalah anggaran yang disebut dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari manajer dan semua tingkatan. Estimasi yang ditentukan oleh manajer level rendah tidak dapat begitu saja diterima oleh manajer level yang lebih tinggi. Jika tidak ada system pengecekan dan pencocokan, partisipasi

anggaran mungkin saja menjadi longgar atau terlalu banyak mengandung “*budgetary slack*” (kelonggaran anggaran) akibatnya adalah inefisiensi dan pemborosan, dengan demikian sebelum anggaran diterima anggaran harus terlebih dahulu di review; secara cermat oleh atasan langsung.

Intinya, seluruh tingkatan organisasi harus bekerjasama untuk menyusun anggaran karena manajer puncak biasanya kurang mengetahui hal secara rinci dan juga kurang mengetahui hal secara rinci dan juga kurang mengetahui kegiatan sehari-hari, maka yang bersangkutan harus mengandalkan informasi. Anggaran lebih rinci dari bawahannya. Disisi lain, manajer puncak mempunyai perspektif lebih luas atas perusahaan secara keseluruhan dan sangat vital dalam pembuatan kebijakan anggaran secara umum. Setiap tingkatan tanggung jawab dalam suatu organisasi harus memberikan masukan terbaik sesuai bidangnya dalam suatu system partisipasi penyusunan anggaran yang terintegrasi.

Manfaat anggaran antara lain untuk merencanakan organisasi atau pertanggungjawaban dalam jangka pendek. Akutansi pertanggungjawaban adalah akutansi yang di desain secara khusus dan diimpletasikan untuk menilai pertanggungjawaban kinerja manajer. Tanggung jawab manajer itu sendiri adalah pendapatan, biaya-laba dan investasi, dan melalui laporan kinerja, anggaran setiap pertanggungjawaban dibandingkan dengan realisasinya. Sehingga dapat ditentukan kinerja manajer setiap pusat pertanggungjawaban. Kinerja manajer adalah untuk menentukan seberapa baik manajer tersebut mengelola pusat pertanggungjawaban.

Pembahasan yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini dibatasi yaitu bagaimana pengaruh partisipasi anggaran dan akutansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial atau kinerja organisasi dapat menunjang

terlaksannya peningkatan efektifitas dan efisiensi organisasi dan dapat meningkatkan kinerja bagi publik.

Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak terjadi kasus yang menyebabkan kesalahan dalam pencatatan ataupun partisipasi dalam penyusunan anggaran dalam sektor publik. Sebagai contoh, Kasus Dugaan korupsi pengadaan bantuan bibit bawang merah di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes tahun 2016 lalu senilai Rp.5,489 miliar yang dilakukan oleh Kepala Dinas (Kadin) Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Budhiarso, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Madyo. Kasus ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara tim pengadaan bibit benih dan Kepala Dinas selaku penanggung jawab anggaran. Petani yang semestinya menerima bantuan dalam bentuk barang, dalam pelaksanaannya sebagian menerima uang. Budhiarso dan Madyo (2016:17) berkata bahwa mereka tidak mengetahui jika di lapangan terjadi penyimpangan dalam pengadaan bibit bawang. Sebelum proyek dilaksanakan, sudah dikumpulkan calon penerima bantuan agar barang yang diterima sesuai standar. Namun bila bibit yang diterima kondisinya tidak bagus agar bias langsung dikembalikan.

(<https://www.jawapos.com/read/2017/08/03/148547/dugaan-korupsi-bibit-bawang-kepala-dpkp-brebes-diperiksa> , diakses pada,30 Januari 2018.)

Kasus ini menunjukkan kurangnya kerja sama dalam hal partisipasi penyusunan anggaran antara atasan dan bawahan, selain itu dipertanyakan juga apakah tidak terdapat bukti kwitansi penggantian uang ataupun bukti penerimaan bibit benih dari aparat kepada petani sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan pusat.

Penelitian mengenai kinerja manajerial pun telah banyak dilakukan oleh para peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Natalya (2016:115)

pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kota balikpapan yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial, sedangkan secara parsial hanya partisipasi anggaran yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisrina Laila pada tahun 2016 yang berlokasi di Dinas Kesehatan Surabaya, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggung jawaban berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial namun secara parsial hanya akuntansi pertanggungjawaban yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Penyebab utama kedua penelitian ini berbeda karena dalam penelien Natalya (2016:85) aparatur sipil negara di dinas tersebut lebih memfokuskan pendekatan koordinasi yang baik dalam proses penyusunan anggaran, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh nisrina laila lebih berfokus pada opini aparatur sipil negara pada dinas tersebut yang berpendapat bahwa apabila hasil dari akuntansi pertanggungjawaban pada setiap individu baik maka akan menghasilkan dampak yang baik pula bagi kinerja manajerialnya.

Berdasarkan riset gap yang terjadi antara teori dan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh antara partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini melibatkan responden dari aparatur sipil negara pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura (LPHPTPH) Di Mojokerto Jawa Timur. Alasan peneliti meneliti di dinas tersebut adalah karena dinas tersebut merupakan wilayah eks karisidenan yang menjadi tempat berkumpulnya para koordinator kecamatan dari 4 wilayah yaitu Sidoarjo, Jombang, Mojokerto dan Gresik. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi**

Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial pada Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Di Sidoarjo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta menganalisis apakah terdapat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis apakah terdapat pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial.
3. Untuk mengetahui serta menganalisis apakah terdapat pengaruh partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial.

1.4 Manfaat penelitian

1. Aspek akademis

Memberikan sumbangan informasi pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan pembanding bagi penelitian lain serta sebagai wujud darma bakti kepada

perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mahardhika Surabaya pada umumnya dan Fakultas Ekonomi pada khususnya.

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Sebagai informasi dan sebagai bahan bacaan serta media yang dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu oleh semua pihak.

3. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai sumbangan dan bahan pertimbangan kepada pengelola perusahaan agar lebih meningkatkan kinerja manajer terhadap perusahaan.